

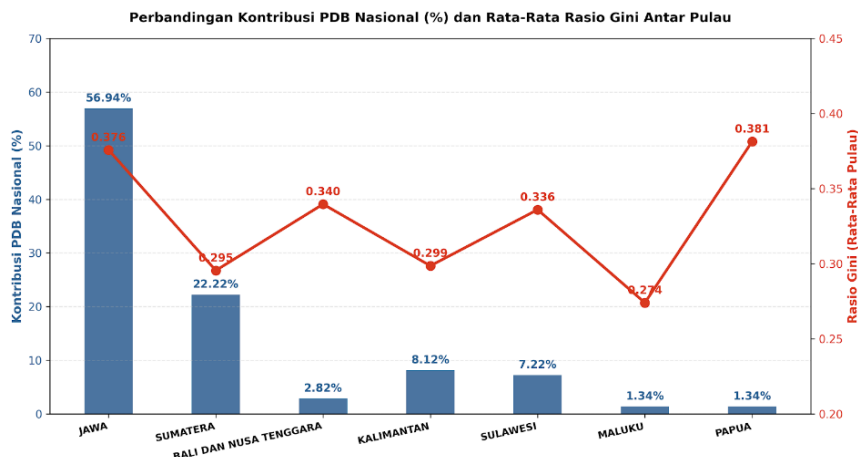
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara historis, Pulau Jawa memegang kedudukan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Berperan sebagai simpul utama aktivitas industri, niaga, dan pusat pemerintahan, wilayah ini terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Kehadiran pemusatan industri manufaktur, kelengkapan infrastruktur pendukung, hingga ketersediaan SDM berkualitas tinggi menjadikan enam wilayahnya (Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, serta Jawa Timur) mempunyai alokasi anggaran daerah dan capaian PDRB per kepala yang jauh mengungguli rata-rata kawasan di luar Pulau Jawa tersebut (Suaib & Agustina, 2022).

Gambar 1.1 PDB Nasional dan Rata Rata Gini Ratio Pulau Pulau di Indonesia Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Merujuk pada perspektif makroekonomi, Pulau Jawa menjadi daerah pengkontribusi termasuk bagi perekonomian nasional. Kontribusi tersebut tercermin

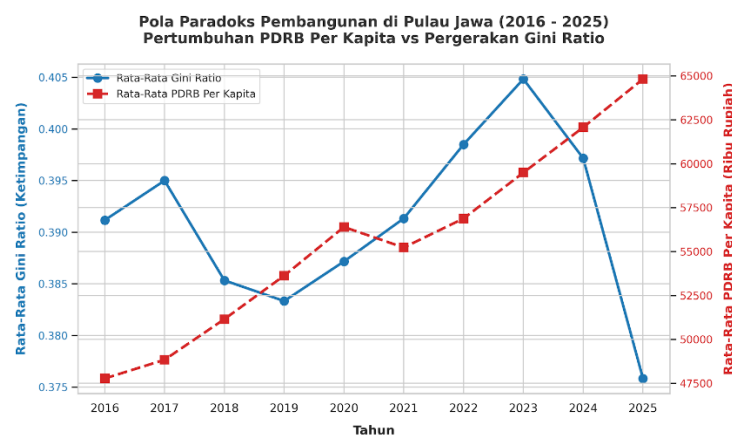
dari pangsa PDB nasional yang mencapai 56,94 persen. Sedangkan posisi terkecil ditempati Maluku dan Papua yang masing-masing dengan kontribusi masing-masing senilai 1,34 persen, Bali dan Nusa Tenggara senilai 2,82 persen, Sulawesi senilai 7,22 perse, serta Kalimantan senilai 8,12 persen. Kemudian posisi kedua, Pulau Sumatera dengan kontribusi sebesar 22,22 persen. Besarnya peranan Pulau Jawa dalam pembentukan PDB nasional menunjukkan kuatnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Namun demikian, tingginya sumbangsih ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pendapatan antarmasyarakat.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari perkembangan ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui indikator *Gini Ratio*. Pergerakan *Gini Ratio* di Pulau Jawa menunjukkan pola yang berfluktuasi dan berada pada tingkat yang relatif tinggi, dengan nilai rata-rata senilai 0,375. Ketimpangan tersebut dapat dikaitkan dengan adanya perbedaan distribusi pendapatan di antara provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa. Dengan kata lain, besarnya kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB nasional tidak secara langsung menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi telah terdistribusi secara merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

Fenomena tersebut salah satunya terlihat pada DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki aktivitas ekonomi relatif tinggi, tetapi masih menghadapi persoalan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2025, *Gini Ratio* DKI Jakarta tercatat sebesar 0,423, sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 0,414. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingginya aktivitas produksi, konsumsi, investasi, dan perputaran ekonomi di Pulau Jawa belum sepenuhnya menghasilkan distribusi manfaat pembangunan yang bersifat inklusif.

Ketimpangan tersebut juga menunjukkan bahwa manfaat perkembangan ekonomi masih berpotensi terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu, khususnya kelompok yang memiliki kemampuan lebih besar dalam mengakses modal, teknologi, dan berbagai sumber daya ekonomi. Di sisi lain, masyarakat yang bergantung pada pekerjaan formal berupah rendah maupun sektor informal masih menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Dengan demikian, dominannya kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional masih dihadapkan pada persoalan pemerataan, sehingga distribusi manfaat pembangunan menjadi salah satu tantangan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah tersebut.

Gambar 1.2 Pertumbuhan PDRB Per Kapita dan Pergerakan Gini Ratio Provinsi Pulau Jawa 2016-2025

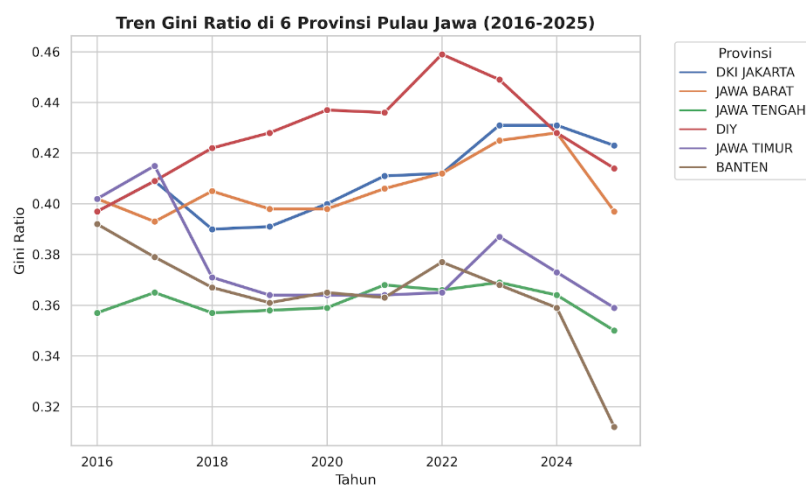


Sumber : Badan Pusat Statistik 2016 sampai dengan 2025

Dapat dilihat data pertumbuhan PDRB Per Kapita dan Gini Ratio dari tahun 2016 sampai 2025 terdapat urgensi. Tahun 2016, permasalahan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa menunjukkan pola yang persisten dan berakar secara struktural. Sebelum masa pandemi (2016–2019), provinsi dengan pusat urban besar seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta secara konsisten telah mencatatkan angka Rasio Gini yang melampaui batas rata-rata nasional.

Kondisi ini sempat mengalami peningkatan akibat guncangan pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021 yang menekan seluruh aktivitas ekonomi modern di perkotaan. Namun, memasuki fase pemulihan ekonomi pasca pandemi hingga tahun 2025, pertumbuhan ekonomi yang kembali terakselerasi ternyata tidak serta merta mengikis jurang pemisah antar kelompok pendapatan. Sebaliknya, hasil pembangunan terbaru justru memperlihatkan bahwa pola ketimpangan kembali mencuat ke level pra-pandemi, di mana wilayah metropolitan kembali mendominasi tingkat kesenjangan tertinggi di Indonesia. Fluktuasi dan persistensi kesenjangan dalam satu dekade terakhir (2016–2025) secara visual terdokumentasi pada capaian angka Rasio Gini terbaru berikut ini:

Gambar 1.3 Rasio Gini Provinsi Pulau Jawa Tahun 2016-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (2016-2025)

Eskalasi aktivitas perekonomian di Pulau Jawa belum sepenuhnya berkelindan dengan pemerataan distribusi pendapatan. Kendati wilayah ini memiliki kapasitas ekonomi yang relatif dominan, disparitas kesejahteraan antarkelompok masyarakat masih menjadi persoalan yang bersifat struktural. Publikasi Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan

pendapatan yang direpresentasikan melalui *Gini Ratio* menunjukkan perbedaan yang cukup kentara antardaerah. Pada tahun 2025, misalnya, DKI Jakarta mencatatkan *Gini Ratio* sebesar 0,423, sedangkan Provinsi Banten berada pada angka 0,312. Variasi tersebut mengelucidasi bahwa ekspansi kegiatan ekonomi belum serta-merta berimplikasi pada distribusi hasil pembangunan yang proporsional di seluruh lapisan masyarakat.

Kompleksitas tersebut turut dipengaruhi oleh karakteristik transformasi struktur ekonomi Pulau Jawa yang semakin bertumpu pada aktivitas dengan intensitas modal dan teknologi relatif tinggi. Industri manufaktur berskala besar, jasa keuangan, dan sektor properti merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang memiliki karakteristik tersebut. Ekspansi sektor-sektor tersebut menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap tenaga kerja dengan kompetensi spesifik dan tingkat produktivitas tinggi. Pada sisi yang berbeda, kelompok masyarakat dengan keterbatasan modal manusia maupun akses terhadap sumber daya produktif masih banyak menggantungkan penghidupannya pada pertanian tradisional serta aktivitas informal yang memiliki kapasitas remunerasi relatif terbatas. Asimetri karakteristik kesempatan kerja tersebut berpotensi menghasilkan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang tidak seragam antarkelompok masyarakat (Anas Iswanto Anwar, 2023).

Disparitas dalam struktur kesempatan kerja selanjutnya dapat berimplikasi terhadap diferensiasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya nilai PDRB Pulau Jawa tidak secara otomatis merefleksikan persebaran kemakmuran yang merata karena geliat perekonomian cenderung terakumulasi pada kawasan metropolitan, pusat perdagangan, dan kawasan industri. Sementara itu, sejumlah

wilayah perdesaan, pesisir, dan daerah yang berada di luar episentrum kegiatan ekonomi masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh kesempatan produktif. Masyarakat yang mempunyai kepemilikan aset serta akses luas terhadap modal produktif memiliki peluang lebih besar untuk mengakselerasi pendapatannya. Sebaliknya, kelompok berpendapatan rendah menghadapi friksi yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan dengan produktivitas dan remunerasi yang memadai. Apabila disparitas tersebut tidak direspons melalui instrumen kebijakan yang mampu memperluas akses ekonomi, eskalasi pertumbuhan justru berpotensi memperkuat fragmentasi sosial dan menggerus keberlanjutan pembangunan (Perdana, 2023).

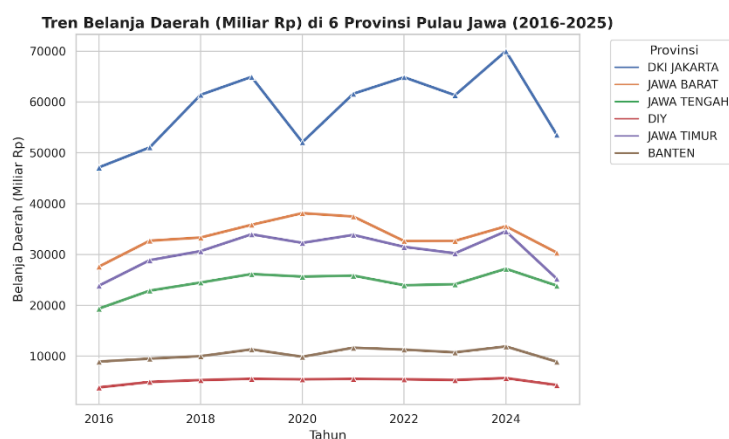
Relasi antara dinamika pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dapat dielucidasi melalui perspektif Hipotesis Kurva Kuznets. Kerangka teoritis tersebut mengemukakan bahwa transformasi ekonomi pada fase awal pembangunan dapat diiringi oleh eskalasi ketimpangan sebagai konsekuensi dari perubahan struktur produksi dan pergeseran sumber-sumber pendapatan. Ketika perekonomian bergerak menuju tingkat perkembangan yang lebih matang, ketimpangan diproyeksikan mencapai suatu titik balik dan kemudian mengalami deklinasi. Dengan demikian, keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan tidak bersifat konstan, melainkan dapat mengalami perubahan seiring dengan tahapan transformasi perekonomian.

Dalam konteks Pulau Jawa, fenomena tersebut menjadi relevan untuk dielaborasi karena peningkatan kapasitas ekonomi berlangsung bersamaan dengan perubahan konfigurasi struktur produksi. Pertumbuhan PDRB per kapita di wilayah ini antara lain ditopang oleh ekspansi industri modern dan jasa berskala besar yang

memiliki kecenderungan spasial terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Konfigurasi tersebut berpotensi mendorong akumulasi pendapatan yang lebih besar pada kelompok pemilik modal serta tenaga kerja berkualifikasi tinggi. Sebaliknya, sebagian masyarakat perdesaan yang masih menjadikan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan menghadapi tantangan ketika laju perkembangan sektor tersebut relatif tertinggal dibandingkan sektor-sektor modern.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi ketidakseimbangan antara ekspansi ekonomi dan inklusivitas hasil pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menguji secara empiris keberadaan hubungan antara PDRB per kapita dan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa dalam perspektif Hipotesis Kurva Kuznets. Pengujian tersebut diharapkan dapat mengelucidasi apakah eskalasi kapasitas ekonomi di Pulau Jawa telah bergerak menuju pola pembangunan yang semakin inklusif atau justru masih disertai dengan peningkatan disparitas pendapatan antarkelompok masyarakat.

Gambar 1.4 Data Belanja Daerah Provinsi Pulau Jawa Tahun 2016-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik 2016-2025

Dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang memiliki kewenangan pengelolaan fiskal di tingkat regional, pemerintah provinsi mempunyai ruang intervensi melalui

penetapan serta realisasi Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD. Perkembangan anggaran tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan pada seluruh provinsi di Pulau Jawa. Salah satu gambaran yang cukup menonjol terlihat pada DKI Jakarta, di mana nilai APBD pada tahun 2024 telah mencapai sekitar 70,012 miliar. Kendati memiliki kapasitas fiskal yang relatif besar, tingginya anggaran tersebut ternyata berjalan beriringan dengan tingkat ketimpangan yang masih cukup tinggi. Konstelasi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kapasitas fiskal daerah mampu dielaborasikan menjadi kebijakan yang efektif dalam mempersempit disparitas pendapatan.

Pada hakikatnya, Belanja Daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dapat berperan sebagai mekanisme redistributif dalam proses pembangunan. Pengalokasian anggaran yang tepat sasaran seharusnya mampu memperluas akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap sumber daya ekonomi melalui pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan, stimulasi bagi usaha mikro, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik. Melalui mekanisme tersebut, belanja pemerintah dapat menciptakan efek pengganda yang mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat inklusivitas pembangunan.

Namun demikian, besarnya kapasitas anggaran pada enam provinsi di Pulau Jawa belum dengan sendirinya mengindikasikan optimalnya efektivitas fiskal dalam mereduksi ketimpangan pendapatan. Komposisi pengeluaran pemerintah yang masih memiliki kecenderungan bertumpu pada kebutuhan operasional dan belanja pegawai menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian. Pengeluaran yang bersifat rutin pada dasarnya diperlukan untuk menjaga

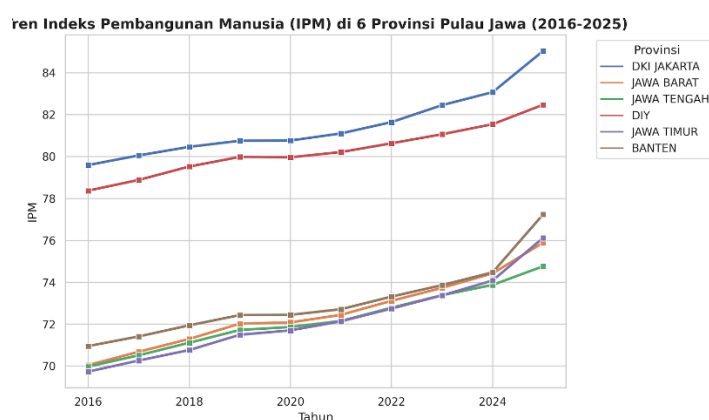
keberlangsungan administrasi pemerintahan, tetapi dampak ekonominya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah cenderung tidak seketika terlihat. Kondisi tersebut berbeda dengan belanja modal dan program pembangunan produktif yang secara potensial dapat menciptakan manfaat ekonomi lebih langsung melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, serta penciptaan kesempatan ekonomi. Keterbatasan proporsi anggaran yang secara eksplisit diarahkan pada pengurangan kemiskinan dan pemerataan ekonomi pada akhirnya dapat membatasi kemampuan Belanja Daerah dalam menekan *Gini Ratio* (Lestari & Hutagaol, 2023).

Selain kapasitas fiskal, kualitas modal manusia (*human capital*) merupakan determinan lain yang memiliki relevansi kuat dalam menjelaskan dinamika ketimpangan pendapatan. Eskalasi industrialisasi dan modernisasi ekonomi menuntut tenaga kerja dengan kompetensi, kesehatan, serta kapasitas adaptasi yang semakin tinggi. Apabila peningkatan kesempatan ekonomi tidak diiringi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia, manfaat transformasi struktural berpotensi terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang telah memiliki kompetensi lebih baik.

Kualitas modal manusia tersebut dapat direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengartikulasikan tiga dimensi fundamental pembangunan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiga aspek tersebut membentuk kapabilitas dasar yang memungkinkan individu meningkatkan produktivitas sekaligus berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan IPM tidak hanya berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup secara umum, tetapi juga berpotensi memperluas

inklusivitas kesempatan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarkelompok masyarakat. Dalam konteks industrialisasi Pulau Jawa, penguatan modal manusia menjadi semakin penting agar transformasi ekonomi tidak hanya menghasilkan eskalasi output regional, tetapi juga mampu memperluas distribusi manfaat pembangunan secara lebih merata.

Gambar 1.5 Data Indeks Pembanguna Manusia Berdasrkan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik 2016-2025

Pulau Jawa memiliki karakteristik pasar tenaga kerja yang relatif kompetitif seiring dengan berkembangnya sektor industri dan jasa yang membutuhkan kompetensi spesifik. Dalam konstelasi tersebut, individu dengan keterbatasan pendidikan dan kondisi kesehatan yang kurang memadai berpotensi menghadapi eksklusi dari pekerjaan dengan produktivitas serta remunerasi yang lebih tinggi. Sebagian dari kelompok tersebut pada akhirnya cenderung terserap ke dalam kegiatan informal yang menawarkan pendapatan relatif rendah atau menghadapi risiko tidak memperoleh pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas modal manusia memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang ekonomi yang tercipta dari proses transformasi struktural.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh provinsi Pulau Jawa menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun demikian, terdapat disparitas capaian antardaerah yang cukup nyata. DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah dengan tingkat IPM yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2025, DKI Jakarta mencatatkan IPM sebesar 85,05, sedangkan Jawa Tengah berada pada angka 74,77. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya variasi kualitas modal manusia di antara provinsi-provinsi Pulau Jawa. Namun, capaian IPM yang tinggi tidak serta-merta menjamin rendahnya ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, peningkatan kualitas pembangunan manusia masih dapat berlangsung bersamaan dengan tingginya disparitas distribusi pendapatan.

Secara konseptual, penguatan IPM diharapkan mampu memperluas kapabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang berada pada lapisan pendapatan rendah. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dapat memperkuat produktivitas sekaligus meningkatkan posisi tawar tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan dengan tingkat remunerasi yang lebih baik. Apabila kapabilitas modal manusia dapat ditingkatkan secara lebih merata, kesempatan masyarakat dari berbagai kelompok sosial untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif juga semakin terbuka. Atas pertimbangan tersebut, IPM ditempatkan sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini guna mengelucidasi keterkaitannya dengan perubahan tingkat ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat di Pulau Jawa (Yusuf et al., 2024).

Kompleksitas relasi antara ekspansi ekonomi, kapasitas fiskal pemerintah daerah, dan kualitas pembangunan manusia menjadikan persoalan ketimpangan

pendapatan di Pulau Jawa penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Ketiga aspek tersebut memiliki jalur pengaruh yang berbeda terhadap distribusi pendapatan, sehingga peningkatan pada masing-masing indikator belum tentu menghasilkan konsekuensi yang seragam terhadap ketimpangan. Melalui pendekatan data panel, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi serta mengelucidasi bagaimana pertumbuhan ekonomi, Belanja Daerah, dan IPM berkorelasi dengan tingkat ketimpangan pendapatan pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Urgensi penelitian juga diperkuat oleh adanya paradoks pembangunan yang terlihat dari perkembangan indikator ekonomi di Pulau Jawa. Di satu sisi, terdapat eskalasi kapasitas ekonomi, peningkatan APBD, dan perbaikan kualitas pembangunan manusia. Di sisi lain, tingkat ketimpangan pendapatan belum menunjukkan penurunan yang konsisten. Konstelasi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ekspektasi teoritis dan manifestasi empiris yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian terdahulu memperlihatkan temuan yang belum sepenuhnya konvergen mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan.

Pada variabel PDRB per kapita, penelitian Fuji Lestari, Fahrudin Zain Olilingo, (2024), menemukan adanya pengaruh positif terhadap *Gini Ratio*, yang sejalan dengan mekanisme Hipotesis Kurva Kuznets pada tahap tertentu pembangunan. Sebaliknya, Janah, (2022) memperoleh hasil bahwa PDRB per kapita memiliki hubungan negatif atau bahkan tidak menunjukkan dampak yang signifikan bagi ketimpangan pendapatan. Perbedaan temuan kajian tersebut mengindikasikan bahwa keterkaitan antara peningkatan kapasitas ekonomi dan

distribusi pendapatan masih bersifat kontekstual serta memerlukan pengujian lebih lanjut. Begitu pula pada variabel belanja daerah (Wardani & Prabowo, 2025) menunjukkan bahwa belanja daerah berperan signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan dan IPM oleh (Andhika Bhagaskara, 2023) menunjukkan adanya pengaruh signifikan IPM terhadap *Gini Ratio*. Variasi hasil empiris tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh kebijakan fiskal dan kualitas modal manusia terhadap distribusi pendapatan belum menghasilkan kesimpulan yang sepenuhnya seragam.

Dalam kerangka teori Musgrave, belanja pemerintah mempunyai fungsi alokasi dan distribusi yang salah satunya diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Peningkatan kualitas pembangunan manusia juga secara konseptual diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi sehingga disparitas pendapatan dapat direduksi. Akan tetapi, realitas empiris di Pulau Jawa memperlihatkan konstelasi yang lebih kompleks. Eskalasi IPM dan peningkatan kapasitas APBD belum secara konsisten diikuti oleh penurunan *Gini Ratio*. Perbedaan antara prediksi teoritis dengan kecenderungan empiris tersebut menjadi celah penelitian yang penting untuk diuji. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan elucidasi empiris mengenai apakah peningkatan pertumbuhan ekonomi, Belanja Daerah, dan IPM benar-benar mampu berkontribusi terhadap reduksi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

Keterbaruan penelitian ini bertumpu pada beberapa aspek. Pertama, penelitian menggunakan rentang observasi 2016–2025 yang merepresentasikan periode relatif mutakhir. Cakupan waktu tersebut tidak hanya merekam dinamika perekonomian dalam kondisi normal, tetapi juga mencakup periode guncangan

ekonomi akibat pandemi serta fase pemulihan hingga tahun 2025. Dengan demikian, penelitian dapat mengakomodasi kemungkinan adanya perubahan karakteristik hubungan antarvariabel sebelum, selama, dan setelah terjadinya gangguan ekonomi berskala besar. Kedua, objek penelitian secara spesifik mencakup enam provinsi di Pulau Jawa sebagai kawasan dengan konsentrasi aktivitas ekonomi nasional yang sangat tinggi sekaligus memiliki persoalan ketimpangan pendapatan yang perlu mendapatkan perhatian.

Aspek kebaruan lainnya terletak pada pengintegrasian PDRB per kapita, Belanja Daerah, dan IPM secara simultan dalam satu kerangka analisis data panel. Kombinasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai faktor ekonomi, fiskal, dan pembangunan manusia yang berkaitan dengan disparitas pendapatan. Hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluatif bagi pemerintah daerah dalam mengartikulasikan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada eskalasi kapasitas ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan. Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, studi ini mengangkat judul "***Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Provinsi Pulau Jawa***".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah PDRB Per Kapita berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Pulau Jawa?
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Pulau Jawa?

3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Pulau Jawa.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Pulau Jawa.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Secara teoretis, kajian ini diposisikan untuk memperluas cakrawala literatur ekonomi pembangunan melalui pengelucidasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah, pembangunan manusia, dan disparitas pendapatan. Pengujian PDRB per kapita, Belanja Daerah, dan IPM secara simultan diharapkan dapat memperkaya diskursus empiris mengenai keterkaitan eskalasi aktivitas ekonomi dengan distribusi hasil pembangunan, sekaligus memberikan perspektif mengenai relevansi Hipotesis Kurva Kuznets pada kawasan dengan konsentrasi aktivitas ekonomi yang tinggi seperti Pulau Jawa. Bagi akademisi maupun peneliti berikutnya, temuan studi ini dapat dijadikan basis rujukan untuk mengelaborasi determinan ketimpangan secara lebih ekstensif melalui penambahan variabel, perluasan horizon observasi, studi komparatif antardaerah, maupun pendekatan spasial

sehingga pemahaman mengenai konfigurasi disparitas pendapatan di Indonesia dapat dikaji secara lebih komprehensif

2. Implikasi Praktis

Studi ini diproyeksikan menghadirkan kontribusi empiris bagi pemerintah provinsi di Pulau Jawa sebagai pijakan dalam perumusan, evaluasi, serta mengartikulasikan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Temuan penelitian dapat menjadi basis evaluatif untuk mengelucidasi sejauh mana eskalasi PDRB per kapita, kapasitas Belanja Daerah, serta peningkatan kualitas pembangunan manusia berkelindan dengan dinamika disparitas pendapatan. Selain itu, hasil kajian ini dapat memberikan pencerahan dalam memetakan kembali prioritas alokasi anggaran agar tidak berhenti pada ekspansi kapasitas ekonomi, tetapi turut mengakselerasi pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat menopang perancangan kebijakan daerah dengan lebih presisi, adaptif, dan inklusif dalam memperkuat fungsi distribusi fiskal serta mereduksi kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat di Pulau Jawa.